BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Definisi Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Munandar (2010:1) Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang.

Lebih mengarah ke sektor publik atau pemerintahan, Riawan Tjandra (2009:6) menjelaskan pengertian anggaran negara dapat dilihat dari tiga sudut pendekatan, yaitu:

a. Sudut administratif, yang ditinjau dari sudut penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara dengan memperhatikan keseimbangan yang logis antara keduanya.
b. Sudut konstitusi, yaitu hak turut menentukan anggaran negara dati perwakilan rakyat (*volksvertegenwoordiging*) yang pada umumnya dicantumkan dalam konstitusi negara. Hail ini dipandang sebagai konsekuesnsi dari Teori Trias Politika Montesquieu meskipun teori tersebut praktis tidak dianut secara murni lagi.
c. Sudut undang-undang/ peraturan pelaksanaan, yaitu keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik, yang memberikan kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut (*Goedhart*). Ditinjau dari sudut Hukum Tata Negara, APBN menitikberatkan pada aspek otosisasi.

Sedangkan, Moeheriono (2012:95) menjelaskan kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan perencanaan strategis suatu organisasi.

Sementar itu, Muhammad Syam Khusufi (2013:35) menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal.

Riawan Tjandra (2009:43) menjelaskan anggaran berbasis kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk membantu pemerintah menjadi lebih tanggap kepada masyarakat pembayar pajak dengan mengaitkan pendanaan program pada kinerja dan produksi. Dalam buku ini juga di jabarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

1) Kejelasan sasaran strategis,
2) Pengembangan dan ketersediaan indikator kinerja (*specific, measurable, attainable or achievable, result oriented, and timebound*),
3) Keterkaitan yang jelas antara sasaran strategis dan indikator kinerja,
4) Kejelasan akuntabilitas kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja yang lebih menekankan pada *outcome*.
5) Perlu perencanaan lebih awal guna mencapat konsensus,
6) *Leadership* untuk mempromosikan perubahan, dan
7) Kehati-hatian dalam implementasi.

Berdasarkan beberapa definis diatas, dapat dikatakan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang lebih menekankan pada pendayagunaan dana mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan perencanaan strategis suatu organisasi untuk mencapai hasil yang optimal.

2.1.1.1 Indikator Prinsip Anggaran Berbasis kinerja

Riawan Tjandra (2009:43) dalam tulisannya, memandang anggaran berbasis kinerja sebagai berikut:

> Anggaran berbasis kinerja saat ini dinilai sebagai suatu pilihan sistem penganggaran yang mampu menstimulasi manajemen birokrasi yang mengacu pada prinsip efektifitas, mengefisienkan alokasi anggaran dalam pelaksanaan program/proyek dan pendanaan infrastruktur publik, menstimulasi keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah, dan melakukan penghematan uang negara tanpa melalaikan prinsip-prinsip profesionalitas.

Pandangan tersebut juga senada dengan insturmen yang dikembangkan oleh menurut Mardiasmo (2011: 133) berikut ini:

1. Pengukuran efektivitas

   Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya.apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan efektif. efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Efisiensi

   Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasa *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut tetapi dalam bentuk relatif,karena efisiensi diukur lewat perbandingan keluar dan masukan. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Pengukuran Ekonomi

   Pengukuran efektivitas hanya memperlihatkan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.ekonomi merupakan ukuran relatif. Pengukuran ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik apat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Dalam konsep implementasi anggaran berbasis kinerja yang dijelaskan di atas, ada kondisi-kondisi yang sangat wajib diperlukan dalam penganggaran berbasis kinerja menurut Riawan Tjandra (2009:44), yaitu:

1) Orientasi yang sama pada hasil (*similar orientation on result*),
2) Penerapan rencana kinerja tahunan (*annual performance plan*),
3) Pengembangan indikator kinerja (*performance indicators*), dan
4) Sistem pengumpulan data kinerja (*performance data collection system*)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka yang dijadikan pengukuran atau indikator dalam penelitian ini untuk variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X_1) adalah indikator menurut Riawan Tjandra (2009:44) yaitu Orientasi yang sama pada hasil, Penerapan rencana kinerja tahunan, Pengembangan indikator kinerja, dan Sistem pengumpulan data kinerja.

2.1.2 Definisi Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Azhar Susanto (2013:22) sistem adalah kumpulan/*group* dari sub-sistem/bagian/komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Sedangkan, Kasmir (2012:7) menerangkan laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Hal senada didefinisikan Hendra S. Raharjaputra (2011:194) bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Hal serupa diungkapkan Fahmi (2012:25) mengemukakan bahwa laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.

Secara garis besar James A. Hall (2012:348) menjelaskan sistem pelaporan keuangan sebagai berikut:

> *Financial reporting is the final steps in the overall accounting process that begins in the transaction cycles ... The process begins with a clean slate at the start of a new fiscal year. Only the balance sheet account are carried forward from the previous year. From this point, the following steps occur:*
> 1) *Capture the transaction*
> 2) *Record in the special journal*
> 3) *Post to subsidiary ledger*
> 4) *post to general ledger*
> 5) *prepare the unadjusted trial balance*

Lebih mengacu ke sektor publik, Norman Flynn & Alberti Asquer (2016:119) menjelaskan sistem pelaporan keuangan pemerintah lebih kepada pelaporan keuangan konsolidasi, berikut penjelasannya:

> *Consolidated financial reporting provides information about the overall financial position of the public sector rather than of any particular component, like the central government, sub-national government, public sector agencies and other entities. For example, consolidated financial reporting provides information on the total level of indebtedness of public sector entities. Without consolidated financial reporting, it would be harder to estimate the total amount of liabilities of the government.*

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaporan keuangan konsolidasi lebih merangkum seluruh posisi keuangan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, daerah bahkan entitas terkecil seperti SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Berdasarkan definisi para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan keuangan adalah suatu proses laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentubaik fisik ataupun non-fisik yang saling

berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

2.1.2.1 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Kasmir (2012:9) kelima komponen yang terkait atas laporan keuangan yaitu :

a. Balance Sheet (Neraca)
b. Income Statement (Laporan Laba Rugi)
c. Laporan Perubahan Modal
d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sejak Januari 2015 serentak seluruh entitas pemerintahan di Indonesia mulai menggunakan standar akuntansi berbasis akrual, yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 dari mulai pemerintah pusat sampai SKPD. mengacu pada peraturan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tersebut, komponen laporan keuangan pemerintah adalah:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3) Neraca
4) Laporan Operasional
5) Laporan Arus Kas
6) Laporan PErubahan Ekuitas

7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan uraian kategori diatas, peneliti mengambil dimensi untuk Sistem pelaporan keuangan, yaitu: *balance sheet*, *income statement*, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan (kasmir 2012:9) .

2.1.2.1.1 Indikator Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Dwi Prastowo (2011:7) yang diikhtisarkan karakteristik pelaporan keuangan yaitu :

a. Dapat dipahami
b. Relevan
c. Keandalan
d. Dapat diperbandingkan

Hal tersebut termasuk karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 71 Tahun 2010. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian karakteristik diatas, peneliti mengambil indikator untuk Sistem Pelaporan Keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan , penyajian jujur dan netralisasi (Dwi Prastowo 2011:7).

2.1.3 Definisi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Menurut Abdul Halim (2012: 20) akuntabilitas dalam arti luas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

Sedangkan, Siswanto (dalam Muhammad Sandy,2015:11) kinerja adalah prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya .

Menurut Mardiasmo (2009:5) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah:

> Dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan pemerintah.

Sementara itu, Mahmudi (2010:28) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984; Elwood,1993 mendefinisikan Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Riawan Tjandra (2009:43) mengemukakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintahan secara garis besar adalah meliputi tahapan-tahapan berikut ini:

1) Penyusunan atau perencanaan strategis
2) Pengukuran kinerja
3) pelaporan kinerja
4) pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Menurut Riawan Tjandra (2009:43) Orientasi akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) pemerintah pada hasil dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, berikut penjelasannya:

> Orientasi Akuntabilitas Kinerja akan menstimulasi kinerja kelembagaan pemerintah dengan keharusan dilakukannya penguatan kapasitas (*capacity building*) guna memenuhi target kinerja yang diharuskan untuk dicapai dalam pengukuran kinerja pemanfaatan anggaran. Pergeseran model anggaran *line-item* menjadi anggaran berbasis akuntabilitas kinerja menjadi suatu keharusan. Implikasi berikutnya adalah peningkatan kualitas kinerja pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan pemaparan definisi oleh para ahli diatas, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien, serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan (Abdul Halim 2012: 20, dan Mahmudi (2010:28) yang mengutip dari Hopwood dan Tomkins, 1984;Elwood,1993).

2.1.3.1 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Hopwood dan Elwood yang dikutip oleh Mahmudi (2010:25) menjelaskan bahwa terdapat 5 komponen :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
b. Akuntabilitas Manajerial
c. Akuntabilitas Program
d. Akuntabilitas Kebijakan
e. Akuntabilitas Finansial

Sedangkan, Syahrudin Rasul (2002:11) menguraikan bahwa dimensi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu :

a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

   Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

e. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publikuntuk membuat

laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Berdasarkan uraian dimensi diatas, peneliti mengambil indikator untuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut Mahmudi (2010:25) dan Syahrudin Rasul (2002:11) yaitu:

1) Penegakan hukum (Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran),
2) Akuntabilitas kejujuran (Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran), .
3) pengelolaan organisasi secara efektif (Akuntabilitas Manajerial),
4) pengelolaan organisasi secara efisien (Akuntabilitas Manajerial),
5) Pertanggungjawaban program (Akuntabilitas Porgram)
6) Dampak (Akuntabilitas Kebijakan)
7) Tujuan (Akuntabilitas Kebijakan)
8) Efisien (Akuntabilitas Finansial)
9) Efektif (Akuntabilitas Finansial)
10) Ekonomis (Akuntabilitas Finansial)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Dedi Nordiawan (2011:27) bahwa kelemahan anggaran berbasis kinerja hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasikan unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya dan banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan, terkadang aktivitas diukur biaya secara detail dan pengukuran secara detail lainnya tanpa adanya pertimbangan memadai yang diperlukan atau tidak adanya aktivitas itu sendiri.

Menurut Mursyindi (2013:58) Anggaran berbasis kinerja melakukan pengklasifikasian akun-akun dalam setiap anggaran berdasarkan dengan menggunakan standar biaya untuk memperoleh efisiensi maksimal yang anggarannya disusun berdasarkan pada perkiaraan biaya perunit standar dikalikan dengan jumlah unit aktivitas yang akan dilakukan dalam periode tersebut.

Menurut Bahri (2012) pada pendekatan anggaran kinerja dilaksanakan untuk terciptanya suatu akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentriliasi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:54), mengungkapkan bahwa, hubungan antara anggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempunyai

hubungan positif secara signifikan, yang menyatakan bahwa upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Begitu pula yang dikemukakan menurut Mardiasmo (2004:105) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kegiatan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat dari pengeluaran dan hasil tersebut.

Sementara itu, Abdul Hafiz Tanjung (2014:6) menjelaskan salah satu permasalahan yang timbul dalam anggaran berbasis kinerja yaitu kelangkaan sumber daya manusia aparatur (kelangkaan sarjana akuntansi) yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi keuangan negara/daerah.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh peneliti Komang Sri Endrayani (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. Menurut Gita Soraya (2012) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahaan.

Berdasarkan penejelasan di atas dapat dikatakan bahwa Anggaran Bebasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahaan.

2.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Menurut Indra Bastian (2010:297) laporan keuangan sektor publik merupakan represtasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik.

Sedangkan Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan bahwa sistem pelaporan keuangan adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah.

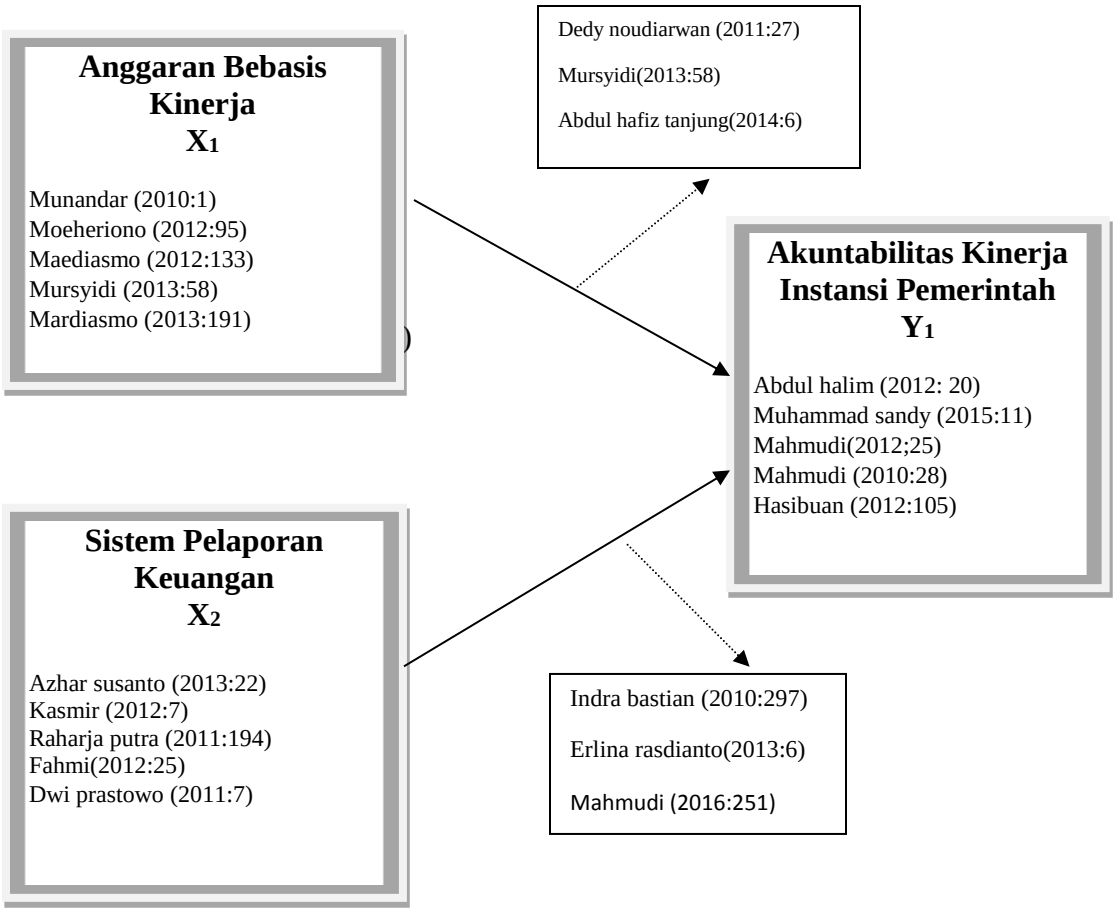
Sementara itu, Mahmudi (2016:251) menyatakan bahwa instansi pemerintah harus membangun dan memiliki Sistem Pelaporan Keuangan yang baik . Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi, dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem laporan keuangan nya .

Menurut Indra Bastian (2010:297), mengungkapkan bahwa, hubungan antara Sistem Pelaporan Keuangan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai hubungan positif secara signifikan yang menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab sistem

pengelolaan keuangan dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh Laura Wahdatul (2010) hasil penelitian mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menurut Ni Made Mega Cahyani(2015) hasil penelitiannya menunjukkan Sistem pelaporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan arah hubungan yang positif.

Berdasarkan pemaparan teori-teori penghubung diatas, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah. Sehingga dapat digambarkan paradigma penelitian yang memperlihatkan hubungan antar *variable* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:99) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Selanjutnya, menurut Nanang Martono (2012:67) hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H_1: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .

H_2: Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah .